

# BAB I

## PENDAHULUAN

### **A. Latar Belakang**

Indonesia merupakan Negara dengan mayoritas penduduk muslim terbanyak ± 256 juta umat, Indonesia juga merupakan salah satu Negara yang memakai sistem pemerintahan demokrasi. Bangsa Indonesia di kenal sebagai masyarakat agamis, agama-agama yang tumbuh dan berkembang di Indonesia adalah Hindu, Budha, Islam, Katolik, Kristen Protestan, dan Khong Hu Cu. Mayoritas masyarakat Indonesia menganut agama Islam. Namun, hal tersebut tidak menutup kemungkinan adanya toleransi antara umat muslim dan lainnya. Adanya sistem demokrasi dan toleransi beragama di Indonesia maka memunculkan beberapa gerakan-gerakan Islam yang bersifat transnasional. Diantaranya Ikhwanul Muslimun, Hizbut Tahrir, Jihadi, Salafi Dakwah dan Salafi Sururi, Jamaah Tabligh (Gerakan Dakwah), dan Syiah. Munculnya gerakan-gerakan Islam yang aktif berdemonstrasi untuk menuntut pemberlakuan syari'at Islam, melakukan razia-razia, dan melanggar aksi-aksi kekerasan atas nama jihad di beberapa kawasan konflik yang menandai eksploitasi pengaruh radikalisme Islam di Indonesia pasca tumbanganya rezim Soeharto. Sebagai reaksi terhadap keputusan para pendiri bangsa untuk

memilih model Negara republikan sekuler yang tidak berlandaskan Syari'at Islam, muncullah ketidakpuasan dari sejumlah elemen bangsa.

Indonesia merupakan salah satu Negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi. Dari bermacam-macam gerakan Islam yang terdapat di Indonesia, tidak semua gerakan Islam tersebut mendukung adanya sistem pemerintahan demokrasi di terapkan di Indonesia. Gerakan Islam yang tidak mendukung adanya sistem pemerintahan demokrasi diterapkan di Indonesia salah satunya adalah Hizbut Tahrir.

Hizbut Tahrir di dirikan pada tahun 1953 M/ 1372 H oleh Syaikh Taqiyuddin bin Ibrahim bin Musthafa bin Ismail bin Yusuf an-Nabhani.<sup>1</sup> Gerakan yang menitik beratkan perjuangan membangkitkan umat di seluruh dunia untuk mengembalikan kehidupan Islam melalui tegaknya kembali Khilafah Islamiyah, ini dipelopori oleh Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani. Pada awalnya Hizbut al Tahrir ingin mendirikan partai politik di Yordania, namun di tolak karena di anggap ilegal oleh pemerintah Yordania. Ini menyebabkan Hizbut al Tahrir ingin membentuk Negara Islam dengan menegakkan kembali sistem Khilafah, karena dengan tegaknya sistem khilafah maka telah menegakkan kembali kedaulatan ditangan Allah yang lebih penting dan utama untuk direalisasikan dari pada masalah Aqidah yang mereka sebut antara hidup dan mati.

---

<sup>1</sup>*Manifesto Hizbut Tahrir untuk Indonesia*, Hizbut tahrir Indonesia, 2009, hal 71.

Hizbut Tahrir salah satu organisasi Internasional yang disini hadir untuk menciptakan Kekhalifahan baru dimana tegaknya program, pemahaman dan keyakinan untuk melaksanakan hukum-hukum dan syariat Islam dibawah sebuah sistem kekhilafahan.<sup>2</sup> Hizbut Tahrir adalah sebuah partai politik yang berideologikan Islam, dan politik merupakan kegiatannya. Hizbut Tahrir merupakan organisasi politik, bukan organisasi kerohanian (seperti tarekat), bukan lembaga ilmiah (seperti lembaga studi agama atau badan penelitian), bukan lembaga pendidikan (akademis) dan bukan pula lembaga sosial (yang bergerak di bidang sosial kemasyarakatan). Ide-ide Islam menjadi jiwa, inti, dan sekaligus rahasia kelangsungan kelompoknya.<sup>3</sup>

Hizbut Tahrir bertujuan melanjutkan kehidupan Islam dan mengemban dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia. Tujuan ini berarti mengajak kaum muslimin kembali hidup secara Islami dalam Darul Islam dan masyarakat Islam. Di mana seluruh kegiatan kehidupannya diatur sesuai dengan hukum-hukum syara'. Pandangan hidup yang akan menjadi pedoman adalah halal dan haram, di bawah naungan Daulah Islamiyah, yaitu Daulah Khilafah, yang dipimpin oleh seorang Khalifah yang diangkat dan dibai'at oleh kaum muslimin untuk didengar dan ditaati agar menjalankan pemerintahan berdasarkan Kitabullah dan Sunnah Rasul-Nya, serta mengemban risalah Islam ke seluruh penjuru dunia dengan dakwah dan jihad. Di samping itu

---

<sup>2</sup>Rofiq Al-amin Ainur, *Membongkar Proyek Khilafah Ala Hizbut Tahrir di Indonesia*, (Yogyakarta: LKIS, 2012), 15.

<sup>3</sup>*Tentang Kami*, <http://hizbut-tahrir.or.id/tentang-kami/>, di akses Januari 2014.

Hizbut Tahrir bertujuan membangkitkan kembali umat Islam dengan kebangkitan yang benar, melalui pola pikir yang cemerlang.

Hizbut Tahrir bergerak dibanyak bagian Negara di dunia, ada di Timur Tengah, Eropa, Asia tengah dan Negara-negara mayoritas Islam atau tidak. Negara-negara tempat Hizbut Tahrir berada seperti Palestina, Perancis, Jerman, Indonesia dan lainnya.

Hizbut Tahrir pertama kali masuk ke Indonesia pada tahun 1980-an dengan merintis dakwah di kampus-kampus besar di seluruh Indonesia. Pada era 1990-an ide-ide dakwah Hizbut Tahrir merambah ke masyarakat, melalui beberapa aktivitas dakwah di masjid, perkantoran, perusahaan, dan perumahan. Hizbut al Tahrir dipimpin oleh Abd al-Rahman al Bahdadi, mendeklarasikan Hizbut al Tahrir di Indonesia dengan nama Hizb al Tahrir Indonesia atau disingkat HTI pada tahun 2000.

Untuk pertamakalinya HTI secara terbuka dihadapan publik untuk mensosialisasikan gagasan-gagasannya. Sebuah konferensi Internasional soal Khilafah Islamiyah digelar di Istora Senayan. Konferensi ini menghadirkan tokoh-tokoh HT dari dalam dan luar negeri sebagai pembicara. Diantaranya KH Muhammad Utsman, SPFK (Indonesia), Ustadz Ismail Al-Wahwah (Australia), Ustadz Syarifuddin M. Zain (Malaysia), dan KH Muhammad Al-Khaththath (Indonesia). Nama terakhir itulah yang sekarang menjadi ketua HT Indonesia yang namanya sedikit diubah menjadi Sabab Hizbut Tahrir Indonesia (SHT). Acara konferensi itu juga sebagai pertanda dimulainya

tahapan kedua perjuangan HT di Indonesia: tahapan berinteraksi dengan masyarakat.

Masuknya Hizbut al-Thahir (HT) ke Indonesia, ini bermula dari Ustadz Mama Abdullah bin Nuh. Pengelola Ponpes al-Ghazali Bogor yang juga staf pengajar di Fakultas Sastra Universitas Indonesia ini, mengajak Ustadz Abdurrahman al-Baghdadi, seorang aktivis HT yang tinggal di Australia untuk menetap di Bogor. Pemikiran-pemikiran HT yang diperkenalkan al-Baghdadi, rupanya mampu menarik perhatian aktivis masjid ini. Mulailah dibuat halaqah-halaqah kecil untuk mengeksplorasi gagasan-gagasan HT. Melalui jaringan Lembaga Dakwah Kampus inilah, ajaran HT menyebar ke kampus-kampus di luar Bogor seperti UNPAD, IKIP Malang, UNAIR, UNHAS, dan akhirnya menyebar ke seluruh Indonesia.

Indonesia adalah salah satu negara yang menjunjung tinggi demokrasi, untuk di Asia Tenggara dan merupakan negara yang paling terbaik menjalankan demokrasinya. Perjalanan demokrasi di Indonesia mengalami pasang surut sejak lahirnya Republik ini hingga sekarang. Indonesia termasuk sebagai bangsa yang beruntung karena sejak awal mayoritas rakyatnya telah memilih sistem demokrasi untuk mengatur negara yang baru lahir.

Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan dimana kekuasaan berada ditangan rakyat melalui perwakilan yang dipilih oleh rakyat. Dalam sistem demokrasi, seluruh warga negara memiliki kebebasan untuk ikut berpartisipasi dalam pengambilan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah.

Selain itu juga terdapat kebebasan politik yang mencakup kondisi sosial, ekonomi dan budaya. Kata demokrasi sendiri berasal dari gabungan dua kata dalam bahasa Yunani, yaitu "Demos" dan "Kratos". Demos memiliki arti "rakyat" sedangkan kratos memiliki arti "kekuasaan".<sup>4</sup>

Demokrasi yang dianut oleh bangsa Indonesia adalah demokrasi pancasila. Sistem demokrasi pancasila berpedoman pada nilai-nilai historis dalam pancasila sebagai ideology negara. Disetiap nilai yang terkandung dalam masing-masing sila, digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia tidak seperti demokrasi di negara lain, demokrasi pancasila memiliki beberapa aspek penting di dalamnya, yakni mengutamakan musyawarah yang mufakat. Selain itu nilai-nilai luhur yang terkandung dalam demokrasi pancasila dapat menyatukan semua perbedaan yang ada di negara Indonesia, sesuai dengan semboyan negara "Bhineka Tunggal Ika" yang memiliki arti "berbeda namun tetap satu jua". Hal ini memiliki makna walaupun terdapat banyak perbedaan di Indonesia, namun tetap berpegang teguh pada satu kesamaan yaitu negara Indonesia.

Penolakan Hizbut Tahrir terhadap sistem pemerintahan demokrasi yang dianut Indonesia banyak dilakukan dengan berbagai cara, seperti aksi demo, seminar, kritikan kepada pemerintah lewat edaran pamflet dan berbagai

---

<sup>4</sup>Demokrasi di Indonesia, <http://9triliun.com/artikel/885/demokrasi-di-indonesia.html>, di akses Januari 2014.

cara sebagai bentuk penolakan terhadap sistem pemerintahan demokrasi di Indonesia.

## **B. Rumusan Masalah**

Mengapa Hizbut Tahrir Indonesia menolak sistem pemerintahan demokrasi di Indonesia?

## **C. Kerangka Pemikiran / Teori yang digunakan**

### **1. Konsep Demokrasi**

Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan politik yang kekuasaan pemerintahannya berasal dari rakyat, baik secara langsung atau melalui perwakilan. Istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu “*demos*” yang berarti rakyat dan “*kratos*” yang berarti kekuasaan. Istilah demokrasi pertama kali diperkenalkan oleh Aristoteles sebagai suatu bentuk pemerintahan, yaitu pemerintahan yang menggariskan bahwa kekuasaan berada di tangan orang banyak (rakyat). Abraham Lincoln dalam pidato *Gettysburg* nya mendefinisikan demokrasi sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Dalam hal ini berarti bahwa kekuasaan tertinggi pemerintah dipegang oleh rakyat.<sup>5</sup>

Konsep demokrasi sangat mendewakan kebebasan, sehingga pada akhirnya nanti tidak mustahil dapat menimbulkan anarki. Dalam

---

<sup>5</sup>Konsep demokrasi, [http://www.academia.edu/4859811/Konsep\\_Demokrasi](http://www.academia.edu/4859811/Konsep_Demokrasi), di akses Januari 2014.

penerapannya, konsep demokrasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat dipandang sebagai sebuah mekanisme dan cita-cita untuk mewujudkan suatu kehidupan berkelompok yang sesuai dengan apa yang terdapat dalam UUD 1945 yang disebut kerakyatan.

Kedaulatan rakyat diwujudkan dengan pemilihan umum yang bebas dan persaingan antara partai politik berjalan secara wajar. Kedaulatan rakyat diwujudkan dalam pemberian peluang bagi semua warga negara untuk menduduki jabatan politik. Kedaulatan rakyat memberi kesempatan sebesar-besarnya kepada rakyat untuk ikut berbicara, memberikan penilaian atas apa yang telah dan hendak dilakukan oleh mereka yang berkuasa atau pemerintah. Kedaulatan rakyat juga diwujudkan dalam kehidupan dimana rakyat menikmati hak-hak dasar mereka sebagai manusia.<sup>6</sup>

## 2. Konsep Khilafah

Konsep Khilafah adalah lembaga pengganti kenabian dalam mengurus kehidupan beragama dan mengatur urusan dunia untuk meneruskan pemerintahan Negara Madinah yang terbentuk dimasa nabi Muhammad, yang dilandaskan oleh Al-qur'an dan as-sunnah Rasulullah SAW.<sup>7</sup> Nabi Muhammad SAW dan Islam tidak pernah menganjurkan dan

---

<sup>6</sup> Afan Gaffar, *Politik Indonesia; Transisi Menuju Demokrasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2006), hal 1-42.

<sup>7</sup> Hizbut Tahrir Indonesia, *Struktur Negara Khilafah; Pemerintahan dan Administrasi*, (Jakarta: dar al-Ummah, 2008), hal 14-30.

memerintah secara jelas mengenai sistem ketatanegaraan tetapi mengakui adanya tata nilai dan etika yang diajarkan di dalam Al-qur'an. Nabi tidak pernah menyatakan bahwa dirinya adalah pemimpin Negara, namun beliau telah menjadikan Negara sebagai sebuah alat bagi Islam untuk menyebarkan dan mengembangkan agama secara luas, yang mengartikan bahwa antara agama dan politik tidak dapat dipisahkan antara satu dan lainnya.<sup>8</sup>

Seperti sejarahnya Rasul memegang dua jabatan, pertama menyampaikan kewajiban sebagai suruhan Tuhan dan kedua sebagai kepala kaum muslimin.<sup>9</sup> Kewajiban pertama telah selesai seketika nabi wafat, namun yang menjadi permasalahan kewajiban yang kedua, siapa yang akan menggantikan beliau, maka tercetus sebuah pemikiran atau ide akan pengganti beliau. Belum Rasul dikebumikan terjadi perdebatan siapa yang akan menggantikannya, dari sahabat-sahabat Rasul, keluarga, kaum Quraisy, kaum Anshar dan orang-orang Muhajirin. Terjadi perdebatan panjang antara mereka, sampai terpilihnya Abu Bakar menjadi khalifah melalui pembai'atan dari Umar, Abu 'Ubaidah, diiringi Basyir bin Sa'ad dilanjutkan oleh masyarakat Islam lainnya, insyaallah semuanya, mengingat khalifah secara kepangkatan tidak sejajar dengan Rasul, namun yang paling mulia disisi Rasul, karena sewaktu Rasul hidup Abu Bakar

---

<sup>8</sup> Fazlur Rahman, loc cit, hal 83.

<sup>9</sup> Hamka, *Sejarah Umat Islam*, (Singapura; Pustaka Nasional, 2002), hal 201.

menggantikannya sebagai Imam sholat disaat Rasul sakit, kejadian itu membuat Rasul percaya kepada Abu Bakar akan memerintah umat.<sup>10</sup>

Sampai pada meninggalnya Abu Bakar berlanjut ke Khalifah selanjutnya sampai ke Khilafahan terakhir yaitu Turki Utsmania. Berakhirnya KeKhilafahan terakhir ini membuat Islam terpinggirkan, Syariat islam dan Sistem Kekhilafahan dengan model yang terkandung dalam Al-qur'an dan as Sunah Rasul tidak dijalankan kembali. Faktor ini menyebabkan munculnya suatu gerakan yang berlandaskan Partai politik Islam yaitu Hizbul al Tahrir, yang ingin menciptakan Kekhalifahan baru di era Modern ini, dengan mengembalikan semua tataran kehidupan bermasyarakat kembali seperti zaman Rasul hidup, semua berlandaskan aturan yang terkandung didalam Al-qur'an dan as-sunah Rasulullah SAW.

### 3. Teori Persepsi

Dari konsep diatas maka penulis akan menggunakan teori persepsi seseorang atau kelompok. Menurut Holsti, persepsi adalah pemikiran seseorang terhadap suatu masalah yang akan mempengaruhi tingkah laku dan tindakan selanjutnya, sesuai dengan asumsi dasar teori persepsi. Teori ini memandang tingkah laku seseorang atau kelompok dipengaruhi dari cara melihat, menafsirkan, menilai lingkungan disekitarnya, dari lingkungan fisik maupun sosialnya, serta melihat dan menilai kedudukannya sendiri didalam lingkungan itu.

---

<sup>10</sup>ibid, hal 200.

Kesimpulan dari teori persepsi yang dianut Holsti adalah setiap tingkah laku atau tindakan yang diambil dari seseorang atau kelompok terhadap suatu masalah akan dipengaruhi oleh persepsi mereka terhadap lingkungan dan keadaan sekitarnya baik dari lingkungan material maupun sampai pada pola pikir terhadap lingkungan sosialnya. Namun persepsi yang ditampilkan itu akan bersifat dinamis atau abstrak yang menurut seseorang itu atau kelompok akan berbeda pandangan maupun pemaparannya.

Persepsi yang dimiliki seseorang atau kelompok itu sering berubah-ubah, yang membuat persepsi itu berbeda dari yang dikemukakan setiap orang atau kelompok yang memaparkan atau menggambarkan persepsi itu, karena ini membuat seseorang atau kelompok sering terjadi kekeliruan dalam memaparkan atau menggambarkan persepsi dari keadaan atau fakta yang sesungguhnya.

Persepsi atau citra inilah yang akan mempengaruhi, mengilhami, serta merangsang tindakan dari seseorang atau kelompok, oleh karena itu dapat dikatakan perilaku itu berasal dari dalam pikiran dan situasi sekitarnya yang menjadikan mereka mempunyai suatu keputusan atau melakukan suatu tindakan.

Jika diaplikasikan dengan permasalahan ini, bahwa persepsi Hizbut Tahrir Indonesia terhadap sistem demokrasi di Indonesia adalah demokrasi menyerahkan hukum kepada rakyat dimana tolok ukurnya

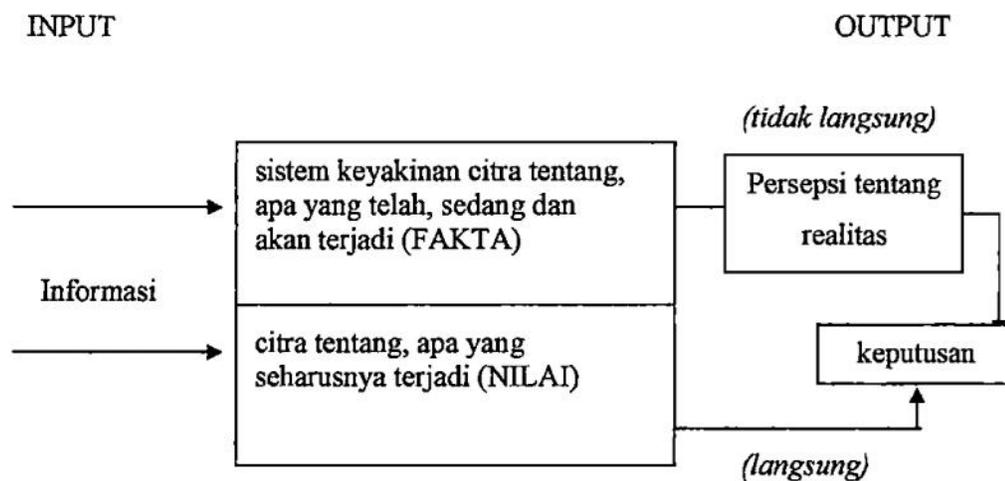
adalah suara mayoritas. Dimana ada suara mayoritas, disitu dianggap ada kebenaran. Sedangkan dalam Islam, kebenaran itu diputuskan oleh nas-nas syara', bukan oleh jumlah suara atau kebanyakan manusia. Bahkan kebanyakan manusia bersepakat atas kebatilan.

Dari situlah jelas bahwa menurut Hizbut Tahrir Indonesia demokrasi bertentangan secara total dengan Islam. Ini tentang pilar pertama demokrasi yaitu kedaulatan rakyat. Semua itu menegaskan bahwa dalam Islam, penguasa dipilih oleh rakyat tidak lain adalah untuk menerapkan dan menjalankan hukum syara', bukan hukum positif buatan manusia seperti dalam demokrasi. Jelas dalam filosofi pelaksanaan pilar kekuasaan milik rakyat ini, demokrasi bertentangan dengan Islam.

Sementara dalam rincian prakteknya, menurut Hizbut Tahrir Indonesia dalam demokrasi pelimpahan kekuasaan kepada penguasa dilakukan menurut teori kontrak sosial, sementara dalam Islam dilakukan melalui akad baiat dari rakyat kepada penguasa. Dalam demokrasi, penguasa "bekerja" kepada rakyat sehingga diberi gaji. Sedangkan dalam Islam, penguasa "mewakili" rakyat mengimplementasikan hukum syara', dan kepadanya tidak diberi gaji melainkan tunjangan untuk mencukupi kebutuhannya dan keluarganya secara makruf, sebab penguasa tersebut telah memberikan seluruh waktunya untuk mengurus rakyat.

Sedangkan teori Persepsi menurut Mochtar Mas'ood menyatakan bahwa persepsi adalah sistem keyakinan, citra atau model tentang dunia

yang dianut oleh seseorang membantunya berorientasi terhadap lingkungan, mengorganisasikan persepsi sebagai penuntun tindakan, menentukan tujuan dan bertindak sebagai saringan dalam menyeleksi informasi dalam setiap situasi.<sup>11</sup>



Gambar 1. Teori Persepsi menurut Mochtar Mas' oed

#### D. Hipotesa

Dari latar belakang permasalahan, perumusan permasalahan yang dikaitkan dengan teori penulisan dapat dikemukakan bahwa: Mengapa Hizbut Tahrir menolak sistem pemerintahan demokrasi di Indonesia:

<sup>11</sup> Sumber: Oleh R. Holsti. "The Belief system and nation images: A case study", di kutip dalam Bruce Russett and Harvey Starr, *World Politics*, ( New York: Freeman, 1985), hal 304 di dalam Mochtar, Mas' oed. 1989. *Studi Hubungan Internasional, Tingkat Analisis dan Teorisasi*. Yogyakarta: Pusat Antar Universitas-Studi Sosial UGM. Halaman 22.

Sikap yang diambil oleh Hizbut Tahrir dalam menolak sistem pemerintahan demokrasi yang di anut Indonesia, dapat dilihat dari definisi demokrasi yang sudah jelas bertentangan secara diametral dengan tuntutan akidah dan syari'at Islam yang menjadikan kedaulatan di tangan Allah.

Selain itu dalam prakteknya, demokrasi sangat bertolak belakang dengan yang seharusnya kedaulatan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat., namun pada faktanya kedaulatan ada di tangan para anggota parlemen. Bahkan anggota parlemen nyatanya tidak berdaulat, tetapi harus nurut pendapat partai. Jadilah, yang menentukan adalah elit partai. Pada akhirnya merekalah yang berdaulat, bukan anggota parlemen apalagi rakyat.

Menurut Hizbut Tahrir demokrasi bukan hanya tidak ada hubungannya dengan Islam, tetapi bertentangan secara mendasar dengan Islam. Sehingga Islam menganjurkan bahwa sistem harus diganti dengan sistem Islam dalam institusi Khilafah.

#### **E. Tujuan Penulisan**

Dengan dilakukan penelitian ini diharapkan penulis dan banyak orang mendapat banyak pengetahuan mengenai beragam sikap dari aliran pemikiran terhadap suatu permasalahan yang terjadi. Terutama tentang pelaksanaan sitem pemerintahan Hizbut tahrir dalam sistem demokrasi di Indonesia.

Serta penulisan skripsi ini sebagai persyaratan meraih gelar Sarjana Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

#### **F. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam menganalisa persoalan dan fenomena yang terjadi, untuk mendukung penulisan tersebut, penulis mendasar pada penggunaan data. Data-data diperoleh dari studi kepustakaan maupun dari hasil studi wacana dengan pihak Hizbut Tahrir yang berada di Indonesia, yang data-data ini akan dijadikan pisau analisis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Adapun sumber-sumbernya adalah:

1. Buku-buku
2. Jurnal, makalah, bulletin, surat kabar, media-media lainnya serta relevan dengan byek yang diamati.
3. Wawancara dengan pihak perwakilan Hizbut tahrir yang berada di Indonesia.

#### **G. Jangkauan Penulis**

Studi ini akan mengambil data-data bagaimana implementasi / pelaksanaan sistem pemerintahan yang digunakan di Indonesia. Dengan objek penelitian Hizbut Tahrir, namun tidak menuntut kemungkinan penggunaan data yang relevan pada masa-masa lain sebagai pengantar tulisan.

## H. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari 5 BAB, yaitu:

- BAB I Dalam BAB ini dibahas mengenai pentingnya permasalahan yang diangkat, latar belakang masalah, pokok permasalahan, kerangka dasar, teori yang menunjang terhadap permasalahan, hipotesa, jangkauan penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisan.
- BAB II Dalam BAB kedua ini, penulis akan membahas mengenai Hizbut Tahrir. Dimana pembahasan akan difokuskan pada latar belakang berdirinya serta hal-hal yang berkenan dengan fenomena gerakan tersebut.
- BAB III Dalam BAB ketiga ini, penulis akan membahas sistem demokrasi yang digunakan di Indonesia, dari aspek sejarah, penggunaan atau penerapan sistem pemerintahan tersebut dan lainnya. Penulis juga akan membahas sikap HTI terhadap sistem pemerintahan demokrasi di Indonesia.
- BAB IV Alasan Hizbut Tahrir Indonesia menolak sistem pemerintahan demokrasi di Indonesia.
- BAB V Kesimpulan dari penulisan skripsi ini dan merupakan BAB penutup dari skripsi ini.